

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum, antara lain Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum tersebut mempunyai suatu hubungan yang erat karena hukum pidana merupakan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana serta pidana apa saja yang dapat dipidana, siapa saja yang dapat dipidana serta pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.<sup>1</sup>

Hukum yang diciptakan manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, termasuk narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Melalui hakekat pemasyarakatan dapat dihadapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan yang positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara, karena ketika masa menjalani pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-program pembinaan. Disamping pidana penjara yang pelaksanaannya menganut dasar pembaharuan pidana yang digerakkan oleh nilai-nilai perikemanusiaan dan pendekatannya menganut sistem

---

<sup>1</sup> Hartono Hadisoeparto, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, Hal.120

pemasyarakatan, haruslah diajarkan pula kepada narapidana untuk mengenal sikap hidup bahwa perlakuan berdasarkan perikemanusiaan terhadap dirinya membawa konsekuensi untuk menuntut kepadanya berbuat serupa kepada sesama manusia yang menjadi anggota masyarakat yang lain. Inti pelajaran yang demikian ini dijaga kelangsungannya agar menjadi falsafah sikap hidup yang memasyarakat kalangan narapidana.<sup>2</sup>

Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, salah satu upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, yang merupakan bagian dari hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 adalah sebagai sarana penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.56

tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut hak-hak warga binaan diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak-hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain. Pidana tidak lagi ditujukan sebagai efek penjeratan, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan.<sup>3</sup>

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pidana yang ingin dicapai dengan suatu pidana yaitu:<sup>4</sup>

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pengertian kejahatan secara yuridis, berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Aspek kejahatan tidak dapat dilepaskan dari pidana. Pidana atau disebut juga penjatihan pidana dalam segala bentuk dan perwujudannya sebetulnya merupakan proses yang diajukan ke Pengadilan yang akhirnya terpidana dijatuhi hukuman yang setimpal demi tercapainya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, Hal. 67

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lumintang, 2004, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.11

<sup>5</sup> Andi hamzah, *Op Cit*. Hal.68

Masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana, bukan masalah teori yang bersifat abstrak. Sasaran pokok dari Hukum Pidana adalah agar individu yang melakukan tindak pidana dapat bertobat dan tidak melanggar hukum lagi (*special prevention*). Selain itu pula pemidanaan ini ditujukan untuk menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa yang melanggar hukum (*general prevention*).<sup>6</sup>

Instrumen hukum merupakan suatu upaya agar perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Tindakan preventif berarti pencegahan agar tidak terjadi, dalam hal ini agar tidak terjadi kejahatan. Sedangkan represif berarti bersifat penahanan (penekanan, pengekangan, atau penindasan). Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.<sup>7</sup>

Pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dilaksanakan di belakang tembok yang tebal yang sama sekali asing bagi narapidana, dikumpulkan dan bergaul dengan penjahat-penjahat dari berbagai tipe manusia yang berbeda asal usulnya. Dalam penjara tersebut para narapidana akan dibina dan dididik dengan tujuan agar kemudian menjadi lebih baik dan berguna sebagai warga negara, lebih terampil dan ahli di bidang pekerjaan tertentu. Falsafah pembinaan narapidana dewasa ini di anut di Indonesia, yaitu yang disebut dengan nama “Pemasyarakatan”, sedangkan

---

<sup>6</sup> Sholehudin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal.186

<sup>7</sup><http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/64> diunduh pada Kamis 13 Maret 2013 Pukul 17.50 WIB

istilah penjara diubah namanya menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” pada tahun 1964 yang digunakan sebagai tempat untuk membina dan sekaligus sebagai tempat untuk mendidik narapidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.<sup>8</sup>“Pemasyarakatan yang dimaksud diartikan dengan ‘memasyarakatkan’ kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*helthily re-entry into community*) yang pada hakekatnya adalah “*resosialisasi*”.Pembinaan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan sistem pemenjaraan yang pada awalnya menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, namun sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya.<sup>9</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

---

<sup>8</sup>P.A.F Lamintang & Theo Lumintang, *Op Cit.* Hal .32

<sup>9</sup><http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/64> diunduh pada Kamis 14 Maret 2013 Pukul 17.10WIB

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Penghukuman bukan hanya untuk melindungi masyarakat semata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. Pelanggar hukum tidak lagi disebut penjahat, melainkan orang yang tersesat.<sup>10</sup> Seseorang yang tersesat dapat bertobat, dan ada harapan berhasil dibina dengan sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya.

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat harus tepat sasaran dengan mempertimbangkan syarat-syarat dan mekanisme yang ada serta diperlukan pengetatan dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang tidak memberikan pembebasan bersyarat kepada Paskah Suzetta. Kebijakan ini tidak ada kaitannya secara politis. Hal ini merupakan kebijakan secara umum untuk melakukan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan keinginan masyarakat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Ini persoalan kebangsaan yang sangat mengganggu. Oleh karena itu diperlukan upaya pemberantasan korupsi yang harus dilakukan dengan cara luar biasa. Pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan dua cara besar, pencegahan dan penindakan. Keduanya harus dapat mengirimkan pesan kepada pelaku korupsi atau orang yang coba-coba korupsi agar tidak berpikir untuk korupsi. Pemberian remisi, pembebasan bersyarat, bahkan asimilasi kepada

---

<sup>10</sup> repository.usu.ac.id/bitstream/.../4/Chapter%20I.pdf diunduh pada Kamis 14 Maret 2013 Pukul 16.50 WIB

warga binaan dan terpidana perlu dilakukan dengan kriteria, syarat dan mekanisme yang tepat. Sehingga perlu ada pengetatan-pengetatan lagi terhadap kriteria, syarat, dan mekanisme yang tepat dalam pemberian hak-hak terpidana korupsi, teroris, dan narkoba. Alasan yang membuat remisi untuk koruptor perlu diperketat adalah karena pertama, ada kecenderungan vonis bagi terpidana kasus korupsi semakin rendah. Kedua, ada indikasi-indikasi penyimpangan terhadap pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan asimilasi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 membedakan syarat pemberian remisi, pembebasan bersyarat kepada terpidana narkoba, teroris, dan korupsi. Kalau terpidana umum minimal menjalani enam bulan. Khusus terpidana narkoba, terorisme dan korupsi harus menjalani 1/3 masa tahanan. Dari dulu ada perbedaan syarat pemberian hak-hak kepada pelaku kejahatan terorganisir seperti terorisme, narkoba, dan korupsi.<sup>11</sup>

Kebijakan untuk memperketat syarat pemberian remisi kepada narapidana koruptor sudah diberlakukan terutama untuk poin remisi koruptor hanya diberikan kepada mereka yang bertindak sebagai *“justice collaborator”* dan *“wistleblower”*. Menkumham dan Wamenkumham pun mengatakan tidak memberikan pembebasan bersyarat untuk Paskah Suzetta. Sejak 19 Oktober 2011 Wamenkumham, hanya pernah beri PB kepada Agus Condro, karena di anggap sebagai *“justice collaborator”* dan *“wistleblower”*. Dan di luar itu tidak pernah diberikan. Sementara Hotma Sitompul selaku pengacara kubu terpidana kasus mafia pajak, Gayus Tambunan

---

<sup>11</sup>Denny Indrayana, 03 November 2011: *Ini Kebijakan Umum, Tak Ada Kaitan Politis*, dalam <http://www.rmol.co/read/2011/11/03/44445/Denny-Indrayana:-Ini-Kebijakan-Umum,-Tak-Ada-Kaitan-Politis>-diunduh pada Kamis 14 Maret 2013 Pukul 17.45 WIB

menyayangkan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meniadakan remisi untuk terpidana kasus korupsi dan terorisme. Hotma Sitompul, pengacara Gayus, menilai pernyataan Wakil Menkumham Denny Indrayana terkait penghentian sementara (*moratorium*) remisi narapidana kasus korupsi. Hotma menilai kebijakan itu telah menyalahi undang-undang.<sup>12</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Pembinaan narapidana menurut konsep pemasyarakatan dapat dilakukan di dalam maupun di luar lembaga. Sistem pembinaan menurut konsep pemasyarakatan tidak hanya memperhatikan potensi individu narapidana, tetapi juga harus diikutsertakan dalam proses pembinaan narapidana. Dengan demikian akan memberikan banyak kebebasan bagi narapidana untuk berhubungan dengan masyarakat luar yaitu yang disebut sebagai Integrasi Narapidana, yang tentunya juga harus diikuti dengan penyesuaian pada masyarakat, sebagaimana masyarakat juga perlu mempersiapkan diri ikut memikul tanggung jawab dalam usaha-usaha menerima dan mendidik narapidana. Sehingga ketika keluar dari Lapas/Rutan eks narapidana dapat menjadi baik,

---

<sup>12</sup>Sriwijaya Post, 2011 <http://palembang.tribunnews.com/2011/11/01/paskah-korban-pertamadiunduh> Kamis 14 Maret 2013 Pukul 17.40 WIB



dapat diterima di masyarakat, tidak ditolak masyarakat, dan mempunyai ketrampilan yang dapat digunakan untuk bekerja.<sup>13</sup>

Pembinaan bagi narapidana di luar RUTAN/LAPAS yang dimungkinkan oleh Sistem Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan/Narapidana dengan masyarakat.<sup>14</sup>

Narapidana adalah anggota masyarakat yang karena kesalahannya telah melanggar hukum dan nantinya apabila telah selesai menjalani pidananya akan menjadi anggota masyarakat. Biasanya masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda terhadap narapidana, bahkan tidak mau menerima kembali, hal ini tentu saja menjadi hambatan tersendiri bagi proses pemasyarakatan. Undang-Undang pemasyarakatan menjamin hak-hak Narapidana yaitu sesuai dengan Pasal 14 sebagai berikut : “Warga binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga serta Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara

---

<sup>13</sup> Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang. Hal : 240

<sup>14</sup> <http://bengkululapas.wordpress.com/sejarah-3/> diunduh pada Kamis 13 Maret 2013 Pukul 18.20 WIB

lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Hak-hak yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut diatas diberikan terhadap para Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Peraturan tentang Pembebasan Bersyarat tersebut adalah sebagai solusi dari kelebihan kapasitas (*over capacity*) yang rentan akan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana.

Over kapasitas ini secara nasional angkanya mencapai 150%. Hampir 40 % dari total 452 Lapas dan Rutan yang ada di 33 provinsi di Indonesia over kapasitas. Pada sejumlah Lapas over kapasitas penghuni lapas mencapai 300% bahkan ada yang 500%. Kondisi tersebut membuat warga binaan berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan yakni mudah mengalami gangguan psikologi seperti mudah marah, gelisah, dan menutup diri. Kondisi tersebut juga menimbulkan tingginya potensi konflik antar Narapidana, potensi melarikan diri serta menjadi salah satu pemicu terjadinya kerusuhan di Lapas atau Rutan. Jumlah narapidana seluruh Indonesia saat ini mencapai 157.684 orang (50.751 tahanan dan 106.933 narapidana), dan 50% nya merupakan tahanan narkoba. Idealnya rasio petugas pengamanan dengan narapidana adalah 1 orang petugas pengamanan menangani 25 narapidana. Namun pada kenyataannya tidak demikian, pada tahun 2009, 1 orang petugas keamanan menangani 52 narapidana. Pada tahun tersebut

jumlah narapidana mencapai 132.372. Agar ideal jumlah tersebut harus diawasi oleh 21.120 petugas yang setiap hari dibagi dalam 4 shift kerja (5.280 petugas per shift). Akan tetapi pada saat itu jumlah petugas pengamanan hanya ada 10.251 orang.<sup>15</sup>

Untuk mengurangi kelebihan kapasitas di LAPAS/RUTAN, Dirjen Pemasyarakatan melakukan beberapa upaya, salah satunya adalah dengan optimalisasi atau penyederhanaan pemberian Pembebasan Bersyarat. Menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, optimalisasi peningkatan pelayanan pemberian Pembebasan Bersyarat merupakan langkah strategis dalam menangani masalah over kapasitas di LAPAS atau RUTAN.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Penulis bermaksud membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANABERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.PK.04-10 TAHUN 2007” ( Studi Di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonogiri).**

## **B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan keluar dari pokok permasalahan yang diteliti, maka penulis melakukan pembatasan pada pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PK.04-10

---

<sup>15</sup> 17 Mei 2013, <http://hukum.kompasiana.com/2013/05/17/keruwetan-di-lapas-dan-keruwetan-kehidupan-di-dunia-560914.html> diunduh Sabtu, 07 Juli 2013 Pukul 19.00 WIB

Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang dilaksanakan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri.

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini dapat memberi gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman serta mencapai tujuan yang dikehendaki.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan pemberian pembebasan bersyarat menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri ?
3. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

---

<sup>16</sup> Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan HRD*. Jakarta: Pustaka Ilmu, Hal.25

- a. Untuk mendeskripsikan aturan pemberian pembebasan bersyarat menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
  - b. Untuk Mendeskripsikan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri.
  - c. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonogiri .
2. Tujuan Subyektif
- a. Menyusun skripsi untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
  - b. Mengetahui kesesuaian antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan dalam kehidupan masyarakat.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas mengenai aturan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Wonogiri menurut Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Wonogiri.

- b. Memberikan masukan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusus dalam bidang hukum pidana terutama mengenai proses pembinaan Narapidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat.
- b. Memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.
- c. Guna mengembangkan penalaran dan pembentukan pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai mengenai pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Apabila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik

maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut obyektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.<sup>17</sup>

Hubungan yang erat antara tujuan yang ingin yang dicapai dalam pemidanaan dengan lembaga pemidanaan, penindakan, dan kebijaksanaan, dapat dilihat secara jelas dalam cara memperlakukan terpidana di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikaitkan pula dengan pemikiran orang mengenai pidana, yang tumbuh dalam sejarah, yakni dari pemikiran yang tidak manusiawi hingga pemikiran yang menghendaki agar harkat dan martabat terpidana sebagai manusia tetap dihargai, walaupun ia telah melakukan suatu tindakan yang melawan hukum.<sup>18</sup>

Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal prevensi, yakni ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada umum yang disebut prevensi umum (*algemene preventie*).

Hal ini dapat dilakukan dengan dengan ancaman hukuman, penjatuhan

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal.158

<sup>18</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lumintang, 2004, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.22

hukuman, dan pelaksanaan hukuman, ada yang berbeda pendapat yaitu agar prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*special preventie*).<sup>19</sup>

Orang mengenal perlakuan terhadap terpidana di rumah penjara dengan menggunakan apa yang disebut *Pensylvanisch stelsel* atau sistem pemidanaan Pennsylvania. Menurut sistem ini, terpidana yang sedang menjalankan pidana di rumah penjara, masing-masing telah dipisahkan dan ditutup di dalam sel-sel, baik pada siang maupun malam hari sampai orang mengenal apa yang disebut *cellulair stelsel* atau sistem penutupan dalam sel, yang hingga kini masih tetap dipertahankan di sebagian besar rumah penjara di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Cara pemidanaan ini melihat pidana semata-mata sebagai terpidana, tanpa memikirkan tujuan yang ingin dicapai dengan pidana itu sendiri. Cara pemidanaan seperti ini mempunyai sifat yang sangat merugikan bagi narapidana, karena akan membuat para narapidana menjadi lemah secara fisik, akan membatasi kemungkinan para narapidana dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, dan mempersulit para narapidana untuk menyesuaikan dengan kehidupan bermasyarakat secara normal, setelah selesai menjalankan pidana.<sup>20</sup>

Pemasyarakatan merupakan bagian yang paling akhir dari sistem pemidanaan dalam tata atau sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dalam tingkat ini harus dapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.4

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal.23



ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan dari penghuni lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang disebut sebagai narapidana.<sup>21</sup>

Sesuai dengan perubahan nama dari sistem penjara menjadi sistem kemasyarakatan, secara maknawi mengandung perubahan yang mendasar secara paradigmatis terhadap sistem pembinaan yang menjadi patron dari kehadiran LAPAS/RUTAN itu sendiri. Pengaturan mengenai bagaimana, sistem organisasi, visi, misi, dan tujuan dari sistem pemasyarakatan, telah diatur dengan lugas dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagaimana disebut pada bagian-bagian sebelumnya, bahwa prinsip penegakan hukum dan keadilan tidak hanya tergantung dari bagaimana peraturan perundang-undangan yang sudah baik dari substansinya, tetapi juga masalah kultur dan mental para penegak hukum menjadi faktor yang tidak saja penting tetapi dominan dalam implementasinya peraturan perundang-undangan yang ada. Pasal-pasal UU No 12 tahun 1995, tidak akan mempunyai makna yuridis jika tidak ada upaya *law enforcement* yang baik dan tegas terhadap substansi pasal-pasal dimaksud. Demikian juga pasal-pasal UU No 12 Tahun 1995 tersebut bukan satu-satunya pranata terpadu. Namun hal penting yang paling mendasar yang harus mendapat perhatian dan kajian adalah, asas-asas yang baik secara tersirat maupun secara tersurat yang tersebar dalam Pasal-pasal dan bagian UU No 12 tahun 1995. Secara

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.48

universal, asas-asas yang terpenting dalam konteks perwujudan sistem peradilan pidana yang terpadu, adalah asas persamaan di muka hukum, sederhana, cepat, *due process of law*, efektif dan efisien serta akuntabilitas.<sup>22</sup>

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah: Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.

1. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
2. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam LAPAS /RUTAN.
3. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.

Pembinaan pada pelaksanaannya dilakukan dengan dua cara yaitu *intramural* (di dalam LAPAS/RUTAN) dan *ekstramural* (di luar LAPAS/RUTAN). Pembinaan ekstramural salah satunya adalah dengan Pembebasan Bersyarat yaitu proses binaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembinaan ekstramural dilakukan melalui tahapan orientasi, pembinaan, dan asimilasi.

---

<sup>22</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Widya Padjadjaran, Hal .66

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat bertujuan:

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik masyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
2. Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik masyarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan masyarakatan.

#### **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, tertib dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sedangkan metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya.

Adapun pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan pemecahan masalah yang sedang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada tentang pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu usaha yang diteliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat.<sup>23</sup> Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut pelaksanaannya dalam fakta yang terjadi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Wonogiri.

### 3. Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan identifikasi dan analisa akan dilaksanakan pengumpulan data dengan mengadakan penelitian di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Wonogiri.

### 4. Jenis Data

Data penelitian terdiri dari dua jenis data :

#### a) Data Primer

Data primer diperoleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri.

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, Hal.61

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari data-data pustaka, yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

9) Surat Keputusan Menteri serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

10) Peraturan Perundang-undangan lainnya, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat yang diberikan terhadap narapidana.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

### b. Penelitian Lapangan

Dilakukan dengan cara wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi atau data dengan cara melakukan interaksi tanya jawab secara langsung kepada petugas, narapidana dan mantan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri.

## 6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan sehingga merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Dalam Tinjauan Pustaka dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang Rumah Tahanan Negara (Rutan), pengertian Rumah Tahanan Negara (Rutan), tujuan Rumah Tahanan Negara (Rutan), tinjauan umum tentang narapidana, pengertian narapidana, hak dan kewajiban narapidana, tinjauan umum tentang pembebasan bersyarat, pengertian pembebasan bersyarat, syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat, pengajuan dan mekanisme pemberian pembebasan bersyarat.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan menguraikan tentang aturan pemberian pembebasan bersyarat menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri, Kegiatan Penghuni, Sarana dan Prasarana, Jumlah Penghuni, Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat, Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

Penutup, berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.